

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Pada Program ini dipraktikan melaksanakannya di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan berada pada Jl. Diponegoro No. 27, Citarum, Kec Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40115. Berpraktikan disajikan guna menjalankan Kerja Profesi pada Fraksi Gerindra, pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan menyesuaikan sesuai dengan arahan atau perintah dari pembimbing kerja yang bertanggung jawab atas kerja praktikan.

Fraksi memiliki tugas mengelolah aktivitas seluruh keanggotaan untuk keoptimalan berefektivitas serta berefisiensi kerja para anggotanya. Selain itu, fraksi bertanggung jawab untuk mengavaluasi kinerja seluruh keanggotaan juga pelaporan temuan kerja pada umum. Dengan dibentuknya Fraksi berpeluang keanggotan dewan guna mampu menjalankan tugasnya dengan bermaksimal.

Dalam melaksanakan tanggung jawab selama melaksanakan kerja profesi, praktikan dibantu oleh Bapak Andre Lukman, S.Kom., M.M. selaku anggota fraksi sekaligus mentor atau pembimbing kerja praktikan selama dilapangan. Selain itu, selama melakukan pekerjaan praktikan juga berhubungan dengan anggota fraksi dan praktikan lainnya untuk dapat menyelesaikan tugas.

Tugas serta tanggung jawab praktikan dalam menjalankan kegiatan kerja profesi pada Fraksi Gerindra yaitu ikut serta kegiatan yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra, antara lain :

1. Rapat Paripurna
2. Rapat pembahasan P2APBD
3. Reses III
4. Membuat laporan – laporan

3.2 Pelaksanaan Kerja

Pada 19 Juni 2023 – 15 September 2023 praktikan menjalankan kerja profesi pada DPRD Provinsi Jawa Barat. Pertama kali dengan dilakukan praktikan pada hari pertama bekerja adalah praktikan melakukan perkenalan dengan beberapa anggota Fraksi yang hadir di kantor dan beberapa praktikan dari Universitas lain yang sedang melaksanakan magang. Dengan ditemani oleh Pak Andre Lukman selaku pembimbing kerja, praktikan dikenalkan kepada anggota fraksi dan memperkenalkan diri. Selanjutnya, praktikan diantar untuk ke ruangan dimana para praktikan akan melaksanakan tugasnya. Praktikan diberikan arahan oleh Pak Andre terkait tugas-tugas atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh praktikan selama mengikuti kegiatan Fraksi.

Praktikan mampu menjalankan penugasan dengan disajikan secara optail serta berselaraskan waktu ditentukan dalam kegiatan profesionalnya. Lalu aktivitas yang dilakukan oleh praktikan selama melaksanakan pekerjaan di bagian Fraksi Gerindra adalah sebagai berikut :

3.2.1 Membuat Masukan untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024

Pembimbing kerja memberikan tugas berupa membuat masukan untuk RPD tahun 2024 menurut pandangan praktikan. Pembimbing kerja memberikan *File* Rencana Pembanguna Daerah lalu praktikan membuat masukan dan saran sebagai berikut :

Dalam RPD DAN RKPD, hal mendasar dengan wajib dijalankan ialah melalui alternatif mengkaji isu-isu dengan ada. Mengidentifikasi isu sangat penting karena akan dibentuknya perencanaan juga aktifitas dengan turut dijalankan. Pada RPD terdapat beberapa isi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saingnya

Hal ini bisa terjadi apabila SDM bisa menguasai berbagai bidang teknologi dan keterampilan serta keahlian professional mereka yang mana dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan nilai tambah di berbagai sektor industri dan keadaan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubung dengan RPD tahun 2024 Provinsi Jawa Barat dengan meningkatkan kualitas SDM dan daya saingnya maka bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas dimiliki oleh para tenaga kerja. Kualitas yang dimaksud adalah Pendidikan formal, bagaimana cara berperilaku atau bersikap dan lain sebagainya.

- Mengadakan program pelatihan kerja

Hal ini menjadi termasuk alternatif diterapkan guna menunjang mutu tenaga kerja. Pelatihan biasanya dilakukan supaya para SDM semakin terampil melakukan tugasnya selain itu dengan disediakan wadah pelatihan dapat memberikan wawasan yang luas dan kemampuan baru bagi SDM maka kualitas SDM akan meningkat.

- Memberikan dan meningkatkan kesadaran dalam Pendidikan formal

Rendahnya Pendidikan menjadi salah satu faktor kurangnya kualitas SDM, banyaknya SDM yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor perekonomian dan tidak adanya kesadaran dari para SDM. Tidak sedikitnya SDM masih beranggapan bahwa Pendidikan bukanlah suatu kebutuhan yang penting. Maka dari itu pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan bantuan atau memberikan fasilitas yang lebih memadai dan melakukan sosialisasi secara efektif kepada SDM bahwa Pendidikan sangat penting.

- Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM

Dengan melakukan pembinaan atau pengembangan SDM maka dapat memberikan *feedback* yang baik, selain itu pembinaan juga dapat membantu memperkenalkan tantangan yang akan dihadapi para SDM dalam dunia kerja sehingga nantinya SDM bisa dengan mudah mengatasi tantangan tersebut.

2. Membangun Infrastruktur Sebagai Suatu Dukungan Pengembangan Perekonomian

Perekonomian masyarakat bisa meningkat karena adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan, Kawasan pariwisata. Pengembangan Kawasan pariwisata akan memberikan peluang atau dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat terus meningkat.

3. Menyediakan Kesempatan Kerja atau Wadah

Tersedianya wadah atau kesempatan kerja kepada tenaga kerja akan menjadikan angka pengangguran menjadi berkurang dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Hal dengan mampu diterapkan dari pemangku kebijakan ialah melalui menerapkan investasi juga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan, caranya memberikan bantuan yang intensif pajak atau bantuan keuangan maka perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan dan perusahaan juga bisa membuka program pelatihan kerja.

Selain itu, dengan adanya kesempatan kerja maka SDM akan memiliki pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilannya sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dan para SDM akan mampu berkontribusi dalam sektor ekonomi. Pemerintah juga dapat memanfaatkan lapangan pekerjaan yang disediakan untuk menjalankan program sosial maupun pembangunan lainnya.

4. Meningkatkan Kualitas UMKM dan Membantu UMKM

UMKM termasuk perihal berguna guna pembantuan sektor perekonomian, dengan membantu dan meningkatkan kualitas UMKM maka sektor perekonomian akan sangat terbantu. Membantu meningkatkan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal, menyediakan lokasi yang potensial, membantu memasarkan produk UMKM, membantu perizinan usaha dan juga membantu sarana prasarana.

5. Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur

Perencanaan pembangunan daerah sebaiknya dilakukan dengan sangat teliti dan pemerintah harus tau apa yang sedang dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah juga sebaiknya Menerima aspirasi masyarakat terhadap apa yang akan dikembangkan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan keinginan masyarakat.

Meningkatkan komunikasi atau koordinasi pada masing-masing bidang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan (Ekonomi, sosial dan sarana prasarana) agar target pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana atau harapan.

6. Usulan program Jangka Panjang atau RPJP pada Dinas Lingkungan Hidup: Pembangunan Kawasan Pengolahan Sampah Terpadu.

Menurut kami, output dari usulan ini yaitu agar terciptanya provinsi Jawa Barat yang asri dan sejuk. Pengolahan sampah yang terkendali mampu menghasilkan kondisi yang berdampak baik terhadap Jawa Barat.

3.2.2 Membuat Surat Pemberitahuan

Praktikan diberikan tugas untuk membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada SATGAS Sungai Cilamaya dikarenakan terjadi curah hujan rendah yang mengakibatkan air tidak terdorong ke laut sehingga air menggenang dan bau, berikut surat yang dibuat oleh praktikan:

Bandung, 16 Agustus 2023

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan

Yth. Gubernur SATGAS Sungai Cilamaya

Dengan surat ini kami ingin memberitahukan mengenai kondisi sungai di kecamatan Cilamaya Wetan, telah terjadi penggenangan air yang diakibatkan oleh curah hujan rendah. Sehingga air tidak terdorong ke laut menyebabkan bau tidak sedap. Hal tersebut di khawatirkan akan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Maka dari itu melalui surat ini kami sampaikan, besar harapan kami agar diberikan tindakan lebih lanjut oleh Bapak Gubernur serta Satuan Tugas sungai Cilamaya agar dapat menangani masalah yang terjadi di sungai Cilamaya Wetan lebih lanjut.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gina Fadlia Swara, S.E., M.M



Gambar 3.1 Kondisi Sungai Cilamaya
Sumber : Pengadua Masyarakat



Gambar 3.2 Kondisi Sungai Cilamaya
Sumber : Pengaduan Masyarakat

3.2.3 Mengikuti Rapat Paripurna Dan Mengevaluasi Hasil Rapat

Rapat Paripurna termasuk suatu diskusi rapat tertinggi Keanggotaan DPRD dengan pelaksanaannya dipimpin dari ketua ataupun wakil ketua DPRD, bisa bersifat tertutup dan terbuka dimana rapat tertutup adalah hanya anggota dewan saja yang dapat mengikuti rapat, sedangkan rapat terbuka adalah rapat yang boleh diikuti oleh seluruh undangan

termasuk Praktikan dan Wartawan.

Pada tanggal 27 Juni 2023 adalah rapat pertama yang diikuti sertakan oleh praktikan, pada rapat tersebut memiliki 2 agenda yaitu :

1. Agenda 1

- Laporan Komisi
- Persetujuan DPRD terhadap calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) Kabupaten Subang Utara
- Penandatanganan persetujuan bersama
- Sambutan Gubernur Jawa Barat

2. Agenda 2

- Penyampaian Nota Gubernur perihal terkait Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

• Pada tanggal 28 Juli 2023 rapat Paripurna yang memiliki 2 agenda :

1. Agenda 1

- Laporan Badan Anggaran
- Persetujuan terhadap P2APPB Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
- Pendatanganan persetujuan bersama
- Pendapat akhir Gubernur

2. Agenda 2

- Laporan Badan Pembentukan PERDA
- Persetujuan terhadap perubahan program pembentukan PERDA tahun 2023

Pada tanggal 1 Agustus 2023, rapat Paripurna bersama Gubernur Jawa Barat dengan agenda Pengumuman Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa Jabatan 2018 – 2023.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, rapat Paripurna beragendakan pendengaran pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023.

Pada 18 Agustus 2023, rapat paripurna dengan agenda Memperingati hari ulang tahun ke-78 Provinsi Jawa Barat. Rarapat Paripurna memiliki 2 agenda

1. Agenda 1

- Penandatanganan Nota kesepatakan bersama antara Gubernur juga DPRD terkait Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun 2024

2. Agenda 2

- Laporan Pansus IV
- Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah
- Penandatanganan persetujuan bersama
- Pendapat akhir Gubernur



Gambar 3.3 Rapat Paripurna

Sumber : Data Pribadi



Gambar 3.4 Praktikan dalam Rapat Parpiruna

Sumber : Data Pribadi

3.2.4 Menganalisa dan Membuat Pointer RANPERDA

Para pegawai di Provinsi Jawa Barat telah diberi tanggung jawab oleh atasannya untuk melakukan penelaahan dan memberikan masukan terhadap 5 (lima) rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA). Sebagai entitas organisasi Negara di Daerah, RANPERDA bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) merupakan langkah penting dalam proses ini. Pointer yang dibuat praktikan terdiri dari :

1. Nota Pengantar Gubernur



NOTA PENGANTAR GUBERNUR JAWA BARAT

DALAM PENYAMPAIAN 5 (LIMA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023

Gambar 3.5 Nota Gubernur

Sumber : Data Instansi

Praktikan membuat *pointer* tersebut merujuk kepada *File* yang diberikan oleh Pembimbing kerja, *file* tersebut dilampirkan oleh praktikan di *GoogleDrive* yang bisa di akses pada link yang dilampirkan di lampiran, hasil *pointer* sebagai berikut :

Pada tanggal 18 September 2023, PJ Gubernur Bey Triadi Machmudin menyampaikan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kelima rancangan Perda yang dibahas mencakup:

1. Berubahnya bentuk yuridis Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat menjadi Perseroan Daerah
2. Menyertakan pemodalan Pemprov Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat.
3. Menyatukan beberapa Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Barat.
4. Menyertakan pemodalan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bank Perkreditan Rakyat hasil penggabungan.
5. Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

PJ Gubernur menjelaskan pentingnya mengubah bentuk hukum Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat dijadikan Perseroan Daerah. Selain itu, juga membahas kebijakan untuk meningkatkan modal dasar perusahaan untuk memenuhi persyaratan keuangan. PJ Gubernur juga membahas mengenai penggabungan beberapa Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Barat sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian daerah. Proses penggabungan ini melibatkan analisis kinerja dan proyeksi bisnis dari masing-masing bank yang akan digabungkan. Terakhir, PJ Gubernur menjelaskan terkait menyertakan pemodalan Pemprov Jawa Barat dalam bank temuan penyatuan. Semua tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dan mendukung perekonomian daerah.

2. Pernyataan Modal BPR Hasil Penggabungan



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL PENGGABUNGAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, WIBAWA MUKTI JABAR, ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN MAJALENGKA JABAR

2023

Gambar 3.6 Pernyataan Modal BPR Hasil Penggabungan

Sumber : Data Instansi

Praktikan membuat *pointer* tersebut merujuk kepada *File* yang diberikan oleh Pembimbing kerja, *file* tersebut dilampirkan oleh praktikan di *GoogleDrive* yang bisa di akses pada link yang dilampirkan di lampiran, hasil *pointer* sebagai berikut :

Tulisan membahas evaluasi peraturan perundang-undangan terkait permodalan dan penggabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 4 BPR yang menjadi prioritas rencana penggabungan, yaitu PT BPR Karya Utama Jabar Subang, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar Bekasi, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar. Keempat BPR ini awalnya merupakan Korporasi Umum Daerah jugakemudian berubah menjadi Korporasi Perseroan Daerah melalui Perda.

Baik PT BPR Karya Utama Jabar (Subang) maupun PT BPR Cianjur Jabar memulai dengan kepemilikan saham sebesar 20% untuk Pemprov Jabar. Namun pada akhirnya, Pemprov Jabar menjadi pemegang saham

terbesar dengan 51% karena adanya pembatasan daerah. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 51% saham di PT BPR Wibawa Mukti Bekasi, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki 29% saham, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memiliki 20% saham. Peraturan daerah mengatur modal disetor dan modal disetor maksimum untuk masing-masing dari kelima BPR tersebut.

Kelima BPR tersebut bermodalkan mendasar gabungan berjumlah Rp 149.600.000.000.000 juga total permodalan disetorkan berjumlah Rp 69.018.850.000.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal dasar tersebut lebih besar dari jumlah minimum Rp50 juta yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, modal disetor juga telah memenuhi ketentuan minimum 25% dari modal dasar.

Penggabungan BPR tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan permodalan terdahulu juga terpenuhinya kewajiban penyediaan bermodalkan inti minimal bagi BPR dan BPR Syariah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima BPR memiliki kecukupan modal dan telah terpenuhinya KPMM dengan disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, setelah penggabungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi satu-satunya Pemegang Saham Pengendali dengan 51% saham, sementara pihak lainnya tidak memiliki saham lebih dari 25%.

Penyertaan modal daerah pada APBD TA 2023 sampai dengan 32,22 miliar rupiah dimungkinkan untuk dilakukan, mengingat ketersediaan anggaran. Sebagai konsekuensi dari penggabungan empat BPR akan ditetapkan sesuai dengan rancangan peraturan daerah yang akan datang. Dengan komposisi kepemilikan saham dari berbagai pihak tersebut, maka modal dasar PT BPR adalah sebesar Rp. Rp. 149.600.000.000,- sebagai konsekuensi dari penggabungan usaha.

Kewajiban pemegang saham atas pemenuhan modal dasar adalah sebagai berikut:

1. Pemprov Jawa Barat: 51% atau berjumlah Rp. 76.296.000.000,00.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang: 13,57% atau sebesar Rp. 20.300.000.000,00.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi: 10,08% atau sebesar Rp. 15.080.000.000,00.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka: 3,8% atau sebesar Rp. 5.684.000.000,00.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis: 1,55% atau sebesar Rp. 2.320.000.000,00.
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk.: 20% atau berjumlah Rp. 29.920.000.000,00.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan realisasi sebesar Rp. 44.072.750.000,- atau hampir 57,77% dari kewajiban pemenuhan modal dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki kewajiban untuk merealisasikan 42,23% kewajiban pemenuhan modal dasar atau sebesar Rp. 32.223.250.000,00. Implikasi dari desain pengaturan ini adalah peningkatan beban keuangan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 32.219.800.800,-. Namun, APBD Tahun 2022 memiliki ketersediaan anggaran yang memungkinkan untuk merealisasikan penyertaan modal tersebut. Selain itu, penyertaan modal daerah diharapkan akan meningkatkan kinerja BPR hasil penggabungan dengan proyeksi peningkatan pendapatan kotor dan laba bersih.

3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat 2023



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH
JAWA BARAT**

2023

Gambar 3.7 Rancangan Peraturan Daerah

Sumber : Data Instansi

Praktikan membuat *pointer* tersebut merujuk kepada *File* yang diberikan oleh Pembimbing kerja, *file* tersebut dilampirkan oleh praktikan di *GoogleDrive* yang bisa di akses pada link yang dilampirkan di lampiran, hasil *pointer* sebagai berikut :

Dalam Konstitusi Indonesia secara substansi diamanatkan peran Pemda guna pengaturan serta pengurus tugas pada wilayahnya dengan berasaskan otonomi juga tugas pembantuan. Agar tujuan otonomi daerah tercapai, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menyertaan modal pada BUMD.

Pada Jawa Barat, salah satu BUMD dengan memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian daerah adalah PT Jamkrida Jabar. PT Jamkrida Jabar adalah BUMD dengan menyajikan pelayan berpenjaminan kredit guna dikuatkannya modal untuk koperasi juga UMKM, yang dimiliki

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, PT Jamkrida Jabar menghadapi tantangan serius terutama sejak pandemi Covid-19. Peraturan pemangku kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 sudah berimplikasi negatif terhadap sektor UMKM di Jawa Barat. Pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat telah memengaruhi pertumbuhan UMKM, dengan sekitar 58.000 UMKM mengalami pertumbuhan negatif. Tantangan ini mencakup faktor eksternal dan internal.

Kini permodalan mendasar PT Jamkrida Jabar adalah berjumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), selaras akan Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011. Sejumlah Rp 150.000.000 telah disetor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Rp 200.000.000 telah disetor oleh TKP Bank BJB, sehingga total modal yang disetor ialah sejumlah Rp 150.000.000. Serta sisa modal saham portepel berjumlah Rp 146.800.000.000,-, maka total modal disetor PT Jamkrida menjadi Rp 153.200.000.000,- (seratus lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah). Dari tahun 2017 hingga 2021, PT Jamkrida Jabar menghasilkan laba yang sehat dan menunjukkan kinerja operasional yang kuat. Kinerja operasional PT Jamkrida Jabar menunjukkan peningkatan setiap tahun, dicirikan dengan tren kenaikan total volume kredit serta total volume penjaminan pada tahun 2017 yang mulanya sebesar Rp. 2.985,07 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp. 5.782,93 triliun pada tahun 2019, dan sebesar 7.109,25 triliun pada tahun 2021.

Kinerja keuangan PT Jamkrida menunjukkan fluktuasi, dengan terjadinya penurunan pada tahun 2019, dan kembali menunjukkan kenaikan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021. Dari segi jumlah aset, PT Jamkrida pada umumnya menunjukkan tren kenaikan pada lima tahun terakhir, dimana pada 2017 jumlah aset PT Jamkrida Jabar tercatat sebesar 271 triliun rupiah, bertambah kedalam 360 triliun rupiah pada 2019 juga menyentuh angka 397,9 triliun rupiah pada tahun 2021. Selain itu jumlah ekuitas PT Jamkrida Jabar juga menunjukkan tren kenaikan selama lima tahun terakhir dimana tercatat jumlah ekuitas PT Jamkrida Jabar pada tahun 2017 senilai 159,7 Triliun rupiah, meningkat menjadi senilai 161 triliun rupiah pada tahun 2019 dan mencapai angka 199,3 triliun rupiah di tahun 2021.

Laba tahun berjalan menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2017 tercatat senilai 4,11 miliar rupiah dan turun ke angka 3,91 triliun pada tahun 2019. Namun, nilai tersebut kembali menunjukkan kenaikan dimana pada tahun 2021 menyentuh angka 5,99 miliar rupiah. Sedangkan dari segi pembagian dividen sendiri, meski mengalami fluktuasi, namun secara umum terjadi peningkatan sepanjang 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 pembagian dividen oleh PT Jamkrida Jabar menunjukkan angka sebesar 2,77 miliar rupiah, menjadi 2,81 miliar rupiah pada tahun 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menerima total senilai Rp. 12.541.333.220 sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2021 dari kepemilikan saham atas PT Jamkrida Jabar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki ketersediaan anggaran untuk penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida sebesar 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan tahun 2022, serta 96,4 miliar rupiah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2023. Penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida Jabar berimplikasi terhadap kenaikan laba PT Jamkrida Jabar dan secara proyeksi menghindari risiko kerugian hingga 146 miliar rupiah tanpa penyertaan modal dasar. Sebagaimana diilustrasikan dalam grafik tersebut, dengan penambahan modal, laba PT Jamkrida Jabar diperkirakan naik dari senilai 7,13 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 21,19 miliar rupiah di tahun 2026.

Dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida berimplikasi terhadap:

1. Peningkatan volume penjaminan menjadi sebesar 3,6 triliun rupiah bagi UMKM melalui *multiplier effect* sebesar 4,56 triliun rupiah.
2. Peningkatan penerimaan negara sebesar 101 miliar rupiah.
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 11,4 triliun rupiah
4. Menimbulkan beban pengeluaran negara sebesar 1 triliun subsidi bunga yang ditanggung pemerintah dan 1,5 triliun ditanggung masyarakat
5. Menimbulkan *cost of fund* sebesar 45 miliar rupiah.

3.2.5 Mengikuti Reses III dan Hasil Reses III

Selama masa reses, anggota dewan bebas melakukan pekerjaan di luar kantor. Tujuan reses adalah untuk mendengarkan dan menindaklanjuti harapan dan impian para tokoh masyarakat dan pemilih

sehingga para wakil rakyat di setiap daerah pemilihan dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat dengan bertanggung jawab secara etis dan politis kepada mereka. Praktikan mengikuti Reses bersama Bapak H. Arif Hamid Rahman, S.H di Bandung. Selain itu praktikan juga mengikuti reses bersama Bapak H. Ricky Kurniawan, Lc di Cisarua, Kabupaten Bogor. Hasil reses yang di dapatkan antara lain :

1. Masih ditemukan keluhan dari masyarakat terkait praktik pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum dengan berbagai modus bervariasi.
2. Perlu adanya peningkatan pelayanan publik dengan pemberdayaan aparatur negara demi terciptanya kondisi pemerintah yang ideal, yang mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dukungan dan perlindungan terhadap para pelaku ekonomi kecil dan menengah agar tetap bertahan dan memiliki daya saing menghadapi “ketidakpastian pasar” dan para pelaku ekonomi yang memiliki sumber modal yang besar.
4. Masih kesulitannya koperasi untuk melakukan promosi pemasaran produk.
5. Perlunya penguatan modal bidang pertanian dan kelautan.
6. Harus ada intervensi pemerintah untuk membantu sektor permodalan masyarakat.
7. Perlu dilakukan perbaikan terhadap sarana lainnya seperti jembatan dan bendungan serta irigasi desa.
8. Perbaikan sarana penunjang ekonomi rakyat seperti pasar untuk lokalisasi perniagaan, terminal untuk kemudahan dan kenyamanan akses transportasi.
9. Banyak wilayah yang memerlukan penerangan umum.
10. Banyak jalur transportasi khususnya ke daerah dalam kondisi rusak berat dan perlu diperbaiki secepatnya, hal ini untuk mempermudah lancarnya perekonomian masyarakat.

11. Masalah pengangguran (tuna karya) yang harus dilakukan dalam pengetesan dalam bentuk penciptaan lapangan kerja atau diberikan bantuan bantuan untuk mampu menciptakan lapangan kerja sendiri (*Entrepreneurship*).



Gambar 3.8 Kegiatan Reses III

Sumber : Data Pribadi

12. Mengikuti Konsolidasi

Praktikan mengikuti konsolidasi CALEG Gerindra se- Jawa Barat bersama ketua umum Gerindra, Bapak H Prabowo Subianto yang berlokasi di Hotel Pullman Bandung. Konsolidasi CALEG merupakan suatu pertemuan untuk mempertemukan atau menyatukan dan memperkuat hubungan antar individu. Pada kesempatan tersebut, praktikan mendapat kesempatan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dalam konsolidasi tersebut dan praktik mendapatkan suatu pengalaman karena bertemu dengan orang-orang baru serta anggota Dewan atau anggota Legislatif.



Gambar 3.9 Kegiatan Konsolidasi

Sumber : Data Pribadi

3.3 Hambatan Yang Dijumpai

Dalam menjalankan Kerja Profesi di DPRD Provinsi Jawa Barat, praktikan memiliki hambatan yang cukup menghambat diri praktikan dalam melakukan kegiatan. Kendala tersebut terjadi disebabkan oleh faktor Eksternal maupun Internal. Masalah yang dihadapi praktikan dalam melaksanakan kegiatannya antara lain :

1. Kendala Sulit Beradaptasi

Praktikan merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja ketika baru memulai kerja, karena dari pribadi praktikan sendiri sulit untuk beradaptasi dan sulit untuk membuka diri dengan suasana, orang maupun tempat baru. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama agar praktikan merasa nyaman di kantor.

2. Kendala Dalam Memahami Lingkungan Kerja

Praktikan melakukan Kerja Profesi di lingkungan politik, pemahaman praktikan kurang dalam bidang politik. Sehingga ketika anggota lain sedang berdiskusi praktikan tidak bisa banyak memberi tanggapan atau berinteraksi.

3. Kendala Rasa Percaya Diri Praktikan

Rasa takut, tidak percaya diri dan malu untuk bertanya yang praktikan alami juga menjadi salah satu hambatan pada pelaksanaan kerja profesi. Tetapi, dengan seiring berjalannya waktu praktikan bisa mengatasi hal tersebut.

3.4 Cara Menyelesaikan Hambatan

Hambatan yang dialami praktikan tentu saja tidak membuat praktikan menjadi putus asa, melainkan membuat praktikan lebih termotivasi menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dihadapkan. Maka dibahas Solusi dengan dijalankan dari praktik :

1. Mencoba beradaptasi

Praktikan mencoba memulai untuk membuka diri kepada teman sesama praktikan terlebih dahulu, kemudian praktikan memulai untuk ikut makan siang bersama teman sesama praktikan dan hal itu tidak begitu sulit, melihat bahwa teman sesama praktikan sebaya.

2. Mulai Mempelajari Lingkungan Kerja

Praktikan tidak terlalu menguasai tentang politik, hal itu yang membuat praktikan terhambat dalam melaksanakan pekerjaan. Tetapi, praktikan mencoba untuk mencari tahu dan belajar tentang dunia politik. Sehingga, ketika sedang berdiskusi praktikan dapat memahami apa yang sedang di diskusikan.

3. Berusaha Meyakinkan Diri Sendiri

Praktikan selalu berusaha untuk meyakinkan diri sendiri dan tidak malu untuk bertanya, karena apabila praktikan terus merasa malu maka praktikan akan kesulitan selama melaksanakan kerja profesi.

3.5 Manfaat Yang Didapatkan Dari Kerja Profesi

Kerja Profesi yang diwajibkan oleh Universitas bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai atau mata kuliah wajib, tetapi Universitas ingin praktikan atau mahasiswanya mendapatkan pengalaman dari kerja profesi.

Adapun manfaat yang dirasakan atau ditemukan dari praktik dalam menjalankannya, sebagai berikut:

1. Praktikan bisa mengetahui bagaimana berada di lingkungan dunia kerja, sehingga ketika praktikan lulus nanti maka praktikan tidak akan kesulitan.
2. Praktikan dapat meningkatkan skill yang dimiliki, seperti skill komunikasi.
3. Praktikan menjadi mendapatkan pengalaman serta wawasan baru di dalam dunia politik yang sebelumnya tidak pernah didapatkan oleh praktikan.
4. Praktikan dapat merasakan pentingnya mempunyai rasa percaya diri.
5. Praktikan bisa mengenal orang-orang yang memiliki prestasi atau orang-orang hebat dalam dunia politik.